Halaman

DPRD Binjai Minta Jaksa Periksa Wali Kota

Dari Halaman 1

Lanjutnya, Gerindra meminta Kejari Binjai memanggil Walikota Binjai Pak Amir Hamzah untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

"Ini penting dilakukan agar menjawab tuduhan yang selama ini diduga uang tersebut digunakan untuk kepentingan Pilkada Binjai kemarin," tuding H Ronggur, saat dimintai tanggapannya terkait kasus yang kini banyak menjadi perhatian publik di kota Rambutan itu, Minggu (9/11/2025)

'Saya tidak yakin juga beliau terlibat, tapi untuk meluruskan persepsi negatif, sebagai pejabat publik Pak Amir harus dipanggil untuk dimintai keterangan," tambah anggota dewan Binjai yang dikenal sangat vokal ini.

Lebih jauh dikatakannya, kasus korupsi Dinas PU Binjai ini diyakini tidak berdiri sendiri. Sekda dan Inspektorat juga harusnya diperiksa agar jelas benang merah nya.

Ditegaskannya lagi bahwa Gerindra akan kawal kasus ini sampai ke Jaksa Agung di Jakarta jika kasus Dinas PU Binjai ini hanya berhenti di Kepala Dinas PU saja.

Sebagai informasi, Kejaksaan Negeri Binjai telah menetapkan 3 tersangka atas kasus korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun anggaran 2023 dan 2024 . Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pihak Kejaksaan Negeri Binjai yakni PLT. Kadis PUPR Kota Binjai, RIP juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ŠFP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta TSD sebagai rekanan atau pihak ketiga kegiatan proyek.

Berdasarkan keterangan Kepala Kejaksaan

Negeri (Kajari) Binjai Dr. Iwan Setiawan S.H, M.Hum, saat konferensi pers di hadapan para awak media di didampingi jajaran Kepala Seksi, disebutkan penetapan tersangka itu setelah pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dalam realisasi anggaran DBH Sawit Kota Binjai.

"Awal Proyek tersebut, Pemko Binjai mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang bersumber dari Pusat TA 2023 dan 2024 dengan total Rp 14.903.378.000,". Dimana, semua anggaran DBH ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemko Binjai di tahun 2024," ucap Īwan Setiawan.

Dalam perencanaannya, Kajari Binjai melanjutkan, DBH Sawit akan digunakan sebagai anggaran perbaikan dan perawatan badan jalan atas 12 paket pengerjaan dengan rincian 7 paket senilai Rp7.913.265.000,- di tahun 2023 dan 5 paket sebesar RpRp 6.990.113.000,- untuk tahun

"Tahun 2024 PUTR Pemko Binjai, barulah melaksanakan total 12 Proyek tersebut bersamaan dengan tahun sebelumnya yang dilaksanakan tahun 2024 juga, sehingga total Kegiatan tersebut ada 12 Paket Kegiatan/Proyek," tandas dia.

Iwan Setiawan kembali melanjutkan, dalam serangkaian penyelidikan dan penyidikan oleh pihaknya, ditemukan indikasi atau dugaan perbuatan melawan hukum berupa manipulasi pekerjaan seperti kekurangan volume, waktu pengerjaan melewati batas yang berpotensi merugikan keuangan negara dan atau daerah.

"Dalam hal ini ada 2 paket pihak kontraktor sudah menerima dp sebesar 30% dari dinas PUTR Pemko Binjai, Sementara itu disisi lain

10 kegiatan yang seharusnya selesai dikerjakan tahun 2024 sesuai dengan yang diatur dalam kontrak tidak selesai dikerjakan namun faktanya pekerjaan baru selesai dikerjakan sekitar bulan Mei pada tahun 2025.

Namun didalam Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah dibuat pada Tanggal 24 Desember 2024 yang ditanda tangani PPK dan Rekanan agar seolah-olah pekerjaan tersebut sudah selesai tahun 2024 dari 7 Kegiatan," tukasnya.

Atas penyimpangan yang ditemukan penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejari Binjai serta dari perhitungan pihak ahli, perbuatan ketiga tersangka diduga merugikan keuangan negara dan atau daerah sebesar 2,6 Miliar lebih.

"Atas temuan Penyidik pada Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan tersebut, Penyidik telah menurunkan Tim Ahli untuk pengecekan mutu & menghitung Volume dari 10 Proyek Jalan yang sudah terhampar dilapangan yang mana dari Hasil penghitungan Tim Ahli ditemukan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dgn Kontrak karena adanya kekurangan Volume yg menyebabkan Kerugian Negara Sebesar Rp. 2.656.709.053,-" kata mantan Asisten Pembinaan pada Kejati NTB

Saat ditanya wartawan, apakah akan ada penambahan jumlah tersangka atas kasus tersebut, Kajari Binjai tidak menampik kemungkinan itu dengan menambahkan bahwa pihaknya masih akan terus melakukan pendalaman serta pengembangan perkara yang dimaksud.

'Kita lihat perkembangannya. Kita masih akan melakukan pendalaman atas perkara ini, nanti kita kabari lagi ke kawan-kawan media ya," tutupnya.

Surya Paloh Dukung

Dari Halaman 1

memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. "Tetapi sekali lagi memang, ya, kalau kita mau membawa gerakan perubahan tentu kita mencoba untuk bisa selalu menempatkan faktor objektifitas itu, yang mungkin harus kita hargai bersama, sebagai pedoman daripada sesuatu yang kita harapkan bisa memberikan arti kemajuan kita sebagai satu bangsa," katanya

Soeharto masuk dalam daftar 40 nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional. Daftar nama itu telah resmi diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/10).

Namun, usulan nama Soeharto kini banyak menuai kritik mulai dari koalisi sipil hingga PDIP.

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP MY Esti Wijayanti memandang Soeharto belum sepenuhnya memenuhi syarat untuk diberikan gelar pahlawan na-

Esti yang juga Ketua DPP PDIP itu menilai ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan.

"Belum ada poin-poin yang kemudian bisa merubah, merubah untuk kemudian beliau bisa menjadi pahlawan nasional. Ada hal-hal tertentu yang pasti masih harus dipertimbangkan," kata Esti beberapa waktu lalu.(cnni/

Prabowo Kumpulkan

Dari Halaman 1

Prabowo menggelar rapat dengan sejumlah menteri terkait pengembangan sumber daya manusia berbasis science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

Pada 16 Oktober, Prabowo juga memimpin Rapat Terbatas Kabinet Merah Putih di kediaman Kertanegara. Presiden kala itu memberikan arahan terkait sejumlah bidang strategis.(cnni/js)

Hidayah

Siapa Pahlawan Masa Kini

Dari Halaman 1

agresi militer, melainkan dalam wujud lain yang lebih halus kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, dan dominasi informasi digital yang membentuk cara berpikir masyarakat. Di medan baru inilah, konsep kepahlawanan perlu diredefinisi. Pahlawan masa kini bukan hanya mereka yang berjuang mengangkat senjata, tetapi juga mereka yang berjuang melawan ketidakadilan dan kebodohan dalam konteks kekinian.

Guru di pelosok yang mendidik anak-anak tanpa fasilitas layak, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di daerah terpencil, aktivis lingkungan yang mempertaruhkan keselamatannya melawan perusakan alam, jurnalis yang menegakkan kebenaran di tengah tekanan politik merekalah pahlawan zaman ini. Mereka tidak memiliki pangkat atau monumen, tetapi kontribusinya nyata dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat.

Sayangnya, di tengah hiruk pikuk dunia digital, makna kepahlawanan sering kali bergeser menjadi pencitraan. Banyak figur publik yang tampil di media sosial seolaholah berjuang untuk rakyat, padahal motivasinya lebih pada popularitas. Di sisi lain, orang-orang yang benar-benar bekerja dalam senyap justru jarang mendapat sorotan. Di sinilah tantangan moral masyarakat modern: apakah kita masih bisa mengenali keikhlasan di tengah lautan

Dalam konteks inilah, nilai-nilai dasar kepahlawanan pengorbanan, kejujuran, dan tanggung jawab harus diletakkan kembali sebagai moral publik. Jika para pahlawan 1945 mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan, maka generasi sekarang harus berani mempertaruhkan kenyamanan demi memperjuangkan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan kemanusiaan. Perjuangan hari ini bukan lagi melawan penjajah asing, melainkan melawan korupsi, keserakahan, intoleransi, dan kebohongan yang menggerogoti bangsa dari dalam.

Pahlawan masa kini juga bisa lahir di ruang digital. Mereka yang melawan hoaks, menyebarkan literasi, dan menjaga etika komunikasi adalah garda depan dalam menjaga nalar publik. Dunia maya yang dipenuhi kebencian membutuhkan keberanian moral untuk tetap menebar kebenaran dan kebijaksanaan. Dalam konteks ini, pahlawan digital adalah mereka yang menjadikan teknologi sebagai sarana membangun peradaban, bukan sekadar mencari pengikut.

Namun, di balik semangat itu, bangsa ini juga perlu berhati-hati terhadap banalitas istilah "pahlawan". Ketika semua orang bisa disebut pahlawan, istilah itu kehilangan maknanya. Kepahlawanan sejati bukan diukur dari seberapa besar sorotan media, tetapi dari kesetiaan pada nilai-nilai luhur meskipun tidak ada yang melihat. Seperti pepatah lama, "pahlawan sejati adalah mereka yang berbuat benar ketika tidak ada yang menyaksikan.'

Hari Pahlawan mestinya menjadi ajang refleksi, bukan sekadar nostalgia. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang menghormati jasa pahlawannya, tetapi juga bangsa yang mampu melahirkan pahlawan-pahlawan baru di setiap generasi. Untuk itu, negara harus memberi ruang dan penghargaan bagi mereka yang bekerja untuk kemanusiaan di berbagai bidang, tanpa memandang status sosial atau latar belakang politik.

Kini, ketika kita menikmati kemerdekaan yang diperjuangkan para pendahulu, tugas kita bukan sekadar mengenang, tetapi melanjutkan perjuangan dalam bentuk baru. Membangun integritas di tengah godaan korupsi, menjaga toleransi di tengah polarisasi, serta menegakkan keadilan di tengah ketimpangan ekonomi adalah bentuk perjuangan kontemporer yang tak kalah heroik.

Pahlawan masa kini mungkin tidak berpakaian seragam, tidak memegang senjata, dan tidak memiliki gelar kehormatan. Tetapi mereka hadir di sekitar kita: guru yang jujur, petani yang tekun, relawan yang tulus, dan warga yang berani berkata benar. Kepahlawanan bukan soal masa lalu, melainkan keberanian moral untuk memperjuangkan kebaikan hari ini.

Dengan begitu, setiap orang sesungguhnya memiliki potensi menjadi pahlawan selama ia berbuat dengan hati, bukan demi pamrih. Karena pahlawan sejati tidak menunggu momentum, melainkan menciptakan perubahan dari tempat ia berpijak. Dan mungkin, itulah makna terdalam dari semangat 10 November: bahwa setiap generasi punya panggilannya sendiri untuk menjadi pahlawan.

Sosok di Balik Lagu Viral "Teruntuk Mia"

Dari Halaman 1

Universitas Sumatera Utara (USU) telah menjadi seorang penulis lagu sejak 2013, semasa ia masih berkuliah. Awalnya, perjalanan bermusiknya sempat terkendala karena kondisi fisik yang tidak bisa memungkinkan dirinya untuk bermain alat musik. Namun, ketertarikannya terhadap karya tulis tetap mendorongnya untuk menyalurkan kreativitas melalui blog pribadi dengan menulis puisi dan syair.

'Awal perjalanan saya di dunia musik dimulai pada tahun 2013, saat masih berkuliah di USU. Waktu itu, saya sudah mulai menulis lagu sekaligus puisi dan syair melalui blog pribadi. Namun, perjalanan musik saya sempat terkendala karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk bermain alat musik," ujarnya.

Pada tahun 2020, Nuh merilis lagu perdana dengan menggunakan nama asli, yaitu Rizki Nugroho. Namun, karena ada beberapa pertimbangan akhirnya seluruh lagu dalam album tersebut

di takedown. Ia kemudian memutuskan untuk menggunakan nama panggung "Nuh" agar mudah didengar dan memiliki ciri khas tersendiri. Setelah itu, Nuh merilis album "Mentari di Mata Hujan" yang diawali dengan merilis single yang berjudul "Berdua Denganmu"

Seiring berjalannya waktu, Nuh memilih untuk fokus menjalani kehidupan pribadi dan bekerja diluar musik sebagai seorang ASN, karena sulitnya mengembangkan karier musik di Medan

"Waktu itu saya merasa agak susah berkarier musik di Medan, sehingga pada saat itu saya memutuskan untuk fokus di kehidupan pribadi dan bekerja sebagai seorang ASN," ungkapnya.

Menjelang pernikahannya, ia merilis lagu "Teruntuk Mia" sebagai karya terakhir sebelum memutuskan untuk hengkang. Namun takdir berkata lain, tidak disangka lagu tersebut justru menjadi titik balik besar dalam perjalanan karirnya. Lagu tersebut sudah menembus lebih dari 48 juta pendengar di Spotify. Tidak berhenti disitu, Nuh juga pernah menggelar showcase per-

dananya pada September 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Meskipun ia seorang ASN, hal itu tidak menjadi suatu penghalang bagi Nuh dalam menekuni bakatnya di dunia musik. Di tengah kesibukannya dalam bekerja, ia tetap meluangkan waktunya untuk latihan, produksi, dan workshop setelah pulang kerja. Jika ada jadwal performance, Nuh biasanya meluangkan waktu pada saat akhir pekan dan sepulang kerja pada hari biasa. Dengan cara itulah, ia berhasil menjaga keseimbangan antara karier dan passion tanpa mengorbankan salah satunya.

Nuh berharap agar orang-orang bisa menikmati dan menyukai seluruh lagu yang diciptakan olehnya, bukan hanya satu atau dua karya saja. Ia juga ingin mereka mengenal lagu lainnya dari Nuh sendiri, seperti album "Mentari di Mata Hujan" yang dirilis jauh sebelum lagu viral "Teruntuk Mia", serta single terbarunya berjudul "Simpan Dulu Rindu" yang rilis pada Juli lalu.(*)

Kementerian PU Percepat Penanganan Longsor

Dari Halaman 1

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan ruas Medan-Berastagi memiliki risiko longsor tinggi karena kondisi topografi yang curam dengan perbedaan elevasi sekitar 300 meter antara Medan dan Berastagi.

'Kıta perkuat tebing-tebing rawan longsor ini agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga, terutama untuk mendukung sektor pariwisata di Berastagi yang menjadi destinasi utama masyarakat Sumatera Utara. Insyaallah seluruh pekerjaan bisa rampung Desember untuk mendukung lalu lintas Nataru," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu

Penanganan longsor dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Ditjen Bina Marga, Kementerian PU sejak 13 Juni 2025 dengan durasi 365 hari

kalender. Anggaran proyek sebesar Rp21,7 miliar dikerjakan oleh PT Trimurti Perkasa dengan progres per awal November 2025 mencapai 74,83

Pekerjaan mencakup penanganan longsor di 12 titik, terdiri dari 10 titik perkuatan tebing menggunakan Geomat Tipe III dengan sistem vegetasi dan 2 titik pemasangan jaring kawat kuat tarik tinggi. Selain itu, dilakukan penanaman biji vegetasi dengan teknik taplok dan pemasangan sistem pemantauan CCTV untuk keamanan serta pemantauan kondisi tebing.

Dody menambahkan, dua titik dengan kondisi paling kritis menggunakan teknologi baru yang diadopsi dari Eropa untuk meningkatkan stabilitas

"Khusus dua titik yang paling parah, kita gunakan teknologi dengan material dari Eropa. Materialnya memang impor, tapi pelaksanaannya bisa kita kerjakan di Indonesia. Ini salah satu bentuk inovasi agar penanganan lebih efektif dan tahan lama," imbuh dia.

Ia menegaskan bahwa secara nasional, Kementerian PU terus melakukan pemantauan dan penguatan tebing rawan longsor di berbagai wilayah, terutama menghadapi musim hujan akhir tahun.

Setiap tanun menjelang musim nujan, tim kami di lapangan memastikan kesiapan peralatan, material, dan personel agar jalur nasional tetap berfungsi. Ruas Medan-Berastagi ini menjadi prioritas karena merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi, juga jalur utama wisata," pungkas

Dengan selesainya penanganan longsor ini, diharapkan arus lalu lintas Medan-Berastagi akan semakin lancar, terutama pada periode puncak kunjungan wisata dan pergerakan masyarakat saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (cnni/js)

Mensos Buka Suara soal Dugaan Bullying

Dari Halaman 1

apa Gus Ipul meminta publik tidak berspekulasi terkait isu dugaan bullying ini dan menunggu hasil penyelidikan kepolisian.

"Ya, kita tunggu saja ya, jangan berspekulasi. Kami tadi sempat berdialog dengan para korban, tetapi belum memungkinkan untuk membicarakan hal yang detail," kata Saifullah saat ditemui usai menjenguk para korban yang dirawat di RS Yarsi Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu (8/11).

Kementerian Sosial memastikan rehabilitasi diberikan untuk para korban beserta keluarganya sembari menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian sebelum menarik kesimpulan terkait penyebab ledakan.

Dalam kesempatan tersebut, Saifullah juga menjelaskan pertemuan dengan korban dan keluarga di RS Yarsi lebih difokuskan pada komunikasi ringan untuk mendukung pemulihan psikologis mereka.

"Kami hanya berbicara ringan, menanyakan posisi mereka saat kejadian dan bagaimana mereka menyelamatkan diri. Sebagian besar masih sakit tersebut. didampingi orang tua," ujarnya seperti dikutip

Ia menambahkan, sebagian besar korban masih menunjukkan tanda-tanda trauma, namun semangat untuk pulih tetap kuat.

"Dari hasil dialog dengan para dokter, saya lihat anak-anak punya semangat besar untuk segera sembuh. Mari kita doakan bersama," ucapnya.

Berdasarkan data Pos Pelayanan Polri di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, hingga Sabtu siang pukul 10.00 WIB terdapat total 96 korban ledakan yang dirawat di tiga rumah sakit di wilayah Jakarta Pusat.

Di RS Islam Cempaka Putih terdapat 43 pasien (terdiri atas 14 pasien rawat inap dan 29 pasien yang sudah pulang). RS Yarsi merawat 15 pasien (dengan 14 menjalani rawat inap dan satu sudah dipulangkan), sedangkan RS Pertamina Jaya menangani tujuh pasien, satu di antaranya masih

Secara keseluruhan, sebanyak 67 pasien telah diperbolehkan pulang, sementara 29 orang lainnya masih menjalani perawatan medis di tiga rumah

Dalam jumpa pers di hari yang sama di RS Cempaka Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan terduga pelaku ledakan merupakan siswa sekolah itu sendiri. Siswa ini berusia 17 tahun dan ikut terluka imbas

Listyo menuturkan aparat masih menyelidiki motif pelaku dan bakal memeriksa media sosial hingga Riwayat keluarga untuk mencari jawaban.

Ia mengatakan saat ini kondisi terduga pelaku terus membaik dan diharapkan pemeriksaan bisa segera dilakukan.

Ketika ditanya soal motif dugaan bullying atau perundungan yang dialami terduga pelaku, Listyo mengatakan aparat masih membuka semua kemungkinan lantaran penyelidikan masih berlangsung.

"Itu salah satu yang kita kumpulkan juga terkait bagian dari upaya kita untuk mengungkap motif. Artinya informasi-informasi terkait yang mendukung proses kita untuk mendukung proses kita untuk mendapatkan gambaran motif tentunya kita kumpulkan," ujar Listyo.(ant/js)

Antara Tuduhan dan Tata Kelola yang Harus

Dari Halaman 1

eksekutif dalam hal penganggaran proyek daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan strategis dan alokasi anggaran ada di tangan Kepala Daerah, dibantu TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang terdiri dari Sekda dan

Isu dugaan "godfather" proyek berpotensi mengganggu keadilan distribusi manfaat publik. Namun jika tudingan diarahkan kepada aktor yang tidak memiliki kewenangan otoritatif dalam struktur formal, maka analisis kebijakan publik menjadi bias. Evaluasi atas dampak kebijakan harus berbasis pada data realisasi anggaran, efektivitas program, dan aksesibilitas pelayanan publik-bukan asumsi personalistik

Dialog Terbuka

Daripada membangun narasi tudingan, lebih baik Himpunan Sarjana Hukum menginisiasi dialog akademik terbuka dengan Pemko dan OPD terkait untuk membahas solusi berbasis sistem, bukan sentimen.

Menuduh wakil kepala daerah sebagai aktor "pengatur proyek" tanpa bukti prosedural adalah bentuk generalisasi yang berpotensi melemahkan etika politik lokal. Tuduhan tersebut, jika tidak diiringi data konkret, justru mengaburkan masalah utama: tata kelola birokrasi OPD yang lemah dan tidak transparan.

Perspektif Administrasi Publik: Birokrasi yang Rapuh Bukan karena Satu Orang

Permasalahan utama dalam pembagian proyek daerah bukan pada figur tunggal, melainkan lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal di OPD. Sistem perencanaan pengadaan barang dan jasa masih rentan dipengaruhi pihak eksternal karena belum sepenuhnya digital, partisipatif,

dan berbasis merit. Jika benar terjadi distorsi kebijakan dalam pengalokasian program, maka solusi yang dibutuhkan bukan sekadar mencari "kambing hitam", melainkan membenahi sistem audit proyek, publikasi kinerja OPD, dan memperkuat kapasitas SDM birokrasi.

Perspektif Kebijakan Publik: Keadilan dan **Efektivitas**

Dalam konteks administrasi negara, tudingan terhadap Wakil Wali Kota Medan sebagai dalang "godfather proyek" tampak tidak didukung oleh kerangka kewenangan yang sahih.

Sebuah negara hukum tidak boleh menyandarkan analisis publik pada spekulasi personal, melainkan harus membenahi sistem yang membuka celah intervensi.

Pemko Medan justru harus menjadikan isu ini sebagai momen introspeksi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.